BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Eksistensi dari sumber kekayaan baik hayati maupun hewani begitu penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Sehingga *civic commitment* begitu penting untuk direalisasikan sebagai kontribusi praktis keilmuan PKn bagi upaya pembangunan berkelanjutan, agar bermanfaat bagi generasi bangsa selanjutnya. Dengan memiliki iklim tropis dan mempunyai hutan hujan tropis terbesar di dunia menjadi alasan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan beraneka ragam hal tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut patut di syukuri sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memberi kekayaan sumber daya yang dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan hidup manusia. Keberagaman tersebut dilihat dari berbagai jenis flora dan fauna, salah satunya satwa liar, yang merupaka satwa endemic Indonesia yang memiliki ciri khas unik menyesuaikan dengan habitat aslinya. Hutan merupakan habitat asli dari satwa liar sekaligus rumah sebagai tempat berlindung dan sumber makanan, bahkan tempat melanjutkan keturunan agar tidak punah.

Sumber daya hewani beserta ekosistemnya merupakan salah satu dari sumber daya alam yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur terbentuknya lingkungan hidup yang tidak dapat tergantikan dan perlu dilestarikan. Pembangunan sumber daya hewani dan ekosistemnya merupakan bagian yang sangat penting untuk pembangunan nasional berkelanjutan sebagai bentuk pengamalan dari nilai Pancasila (Budiman, 2014). Sumber daya alam hayati dan hewani pada dasarnya saling bergantung satu sama lain dan saling mempengaruhi apabila terjadi kerusakan ataupun kepunahan, sehingga penting untuk berekomitmen dalam menjaga sumber daya tersebut, sebagai praksis atas pembangunan berkelanjutan.

Sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia lainnya. Tidak hanya berinteraksi dengan sesama tetapi juga perlu berinteraksi dengan lingkugannya, dengan begitu secara tidak langsung kehidupan

Elda Febriyanti, 2022
Implementasi Civic Commitment Melalui Pengelolaan Kebun Binatang (Studi Kasus Bandung Zoological Garden)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

manusia dan satwa saling berdampingan. Tetapi pada praktiknya seringkali manusia merusak lingkungan habitat asli satwa yaitu hutan. Sumber daya hayati, dan sumber daya hewani di hutan manusia ambil, bahkan mengeruknya habisa habisan untuk kepentingannya. Hal yang paling memprihatinkan adalah perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal, bukan hanya dijadikan sebagai bahan makanan tetapi eksis untuk dijadikan sebagai obat-obatan, kosmetik, bahkan kerajinan.

Perdagangan satwa liar memiliki keuntungan yang sangat besar, apalagi untuk satwa langka semakin langka akan semakin mahal harga jualnya. Realitas tersebut menjadi pemantik eksisnya perburuan liar yang tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan, bahkan meluas seperti aktivitas perusakan hutan, kebakaran hutan, pembalakan liar, dan pembangunan pemukiman yang mengancam ekosistem dan jumlah populasi satwa (Aristides, 2016, hlm. 2). Hal tersebut menjadikan hutan tidak dapat melindungi lagi habitat asli satwa, karena rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh manusia. Dilansir dari DW.com (10/9/20) Organisasi konservasi independen terbesar di dunia, Wildlife Fund for Nature (WWF) mengungkapkan jumlah satwa liar berkurang 48% dalam 46 tahun hal tersebut merupakan data yang sangat mengejutkan karena cepatnya pemerosotan jumlah satwa yang terancam punah, dari tahun 1970-2016. Daerah yang sangat berisiko berada di wilayah tropis Amerika Tengah dan Selatan anjlok hingga 94% dalam lima decade terakhir. Di Indonesia sendiri menurut Badan Pusat Statistik jumlah hewan di Indonesia yang terancam punah dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Berikut data dari BPS yang peneliti rangkum.

Tabel 1.1

Jumlah Satwa Liar Terancam Punah

Jenis Satwa	Jumlah Satwa Terancam Punah (Ekor)		
	2015	2016	2017
Harimau Sumatera	58	71	68
Gajah Sumatera	84	115	362
Badak	70	1	80
Banteng	45	381	270
Owa	21	140	492

Orang Utan	143	1153	1890
Bekantan	455	837	1365
Komodo	6	2919	5954
Jalak Bali	7	38	39
Maleo	446	557	1204
Babi Rusa	39	68	616
Anoa	55	-	471
Elang	11	42	82
Tarsius	82	82	82
Monyet Hitam Sulawesi	31	31	63

Sumber: Statistik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015)

Realitas tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena apabila konsisten berlanjut keberagaman satwa di Indonesia akan berkurang dan generasi selanjutnya tidak akan merasakan dan mengetahui keberagamannya. Maka dari itu untuk menjaga agar sumber daya alam hayati dan hewani dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya, diperlukan upaya nyata berupa konservasi sehingga sumber daya alam baik hayati dan hewani konsisten terpelihara, yang mengarah pada mewujudkan keseimbangan tentang ekosistem. Konservasi satwa liar dapat dilakukan di habitat aslinya (*in situ*) maupun di luar habitat aslinya (*ex situ*), yang penting terdapat keadaban warga negara (*civic virtue*) dalam aktivitas konservasi tersebut, demi pembangunan berkelanjutan (Puspitasari, 2016).

Pada basisnya bentuk popular dari konsevasi di luar habitat aslinya (*ex situ*) merupakan kebun binatang. Merujuk Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22 Tahun 2019 tentang Lembaga Konservasi, mengungkapkan fungsi utama lembaga konservasi termasuk kebun binatang adalah sebagai pusat pemeliharaan satwa liar dengan tetap menjaga kemurnian genetiknya, yang berbasis kemanusiaaan (Puspitasari, 2016). Tentu selain selaku lembaga konservasi pemeliharaan satwa, kebun binatang memili fungsi lain yaitu sebagai tempat pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi *(in situ*), dan sarana rekreasi yang sehat (Pasal 2 (2) Permenhut No P.2/2019).

Kebun Binatang Bandung atau disebut dengan *Bandung Zoological Garden* (BAZOGA) adalah salah satu lembaga konservasi flora dan fauna yang terletak di Kota Bandung Jawa Barat. Kebun Binatang ini berada di Jl. Kebun Binatang No.6 Kelurahan Lebak Siliwangi. Memiliki luas sekitar 14 hektar, dan merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berusia 59 tahun. Sebanyak 800 individu dari kelas aves, ikan, reptil & mamalia dimiliki oleh BAZOGA (Suherlan, 2020). Kebun Binatang ini tentu telah memberikan kontribusi besar terhadap pemeliharaan, dan kesejahteraan satwa, mengingat bahwa kebun binatang bukan hanya sebagai lembaga pemeliharaan tetapi juga sebagai sarana rekreasi dan edukasi masyarakat. Maka dari itu pengelolaan kebun binatang harus memiliki standar yang baik khususnya untuk kesejahteraan, keamanan, dan keberlangsungan hidup satwa, bahkan fasilitas yang memadai bagi pengunjung yang ingin berekreasi, pendidikan atau penelitian. Pengungung pun harus senantiasa menjaga kelestarian Kebun Binatang dengan tidak merusak fasilitas, ataupun menyakiti satwa, dan memiliki kepekaan sosial dalam melindunginya.

Tetapi dilansir dari kompasiana.com rabu (11/5/16) Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengajak masyarakat memboikot Kebun Binatang Bandung di akun instagramnya. Dikarenakan kematian gajah sumatera salah satu koleksi kebun binatang Bandung sekarat dan dibiarkan mati begitu saja karena tidak adanya dokter hewan yang khusus penanganinya di kebun binatang tersebut. Ridwan Kamil menilai pengelola kebun binatang tidak professional dalam merawatnya, dan akan mendatangkan dokter hewan dari pemkot Bandung. Kejadian tersebut tidak hanya diungkap oleh Ridwan Kamil dalam instagramnya. Dalam penelitian Pupitasari yang berjudul "Nilai Kontribusi Kebun Binatang Terhadap Konservasi Satwa, Sosial Ekonomi dan Lingkungan Fisik: Studi Kasus Kebun Binatang Bandung" menjelaskan kontribusi kebun binatang Bandung dari seluruh aspek masih dinilai rendah baik itu dari aspek konservasi satwa, aspek social ekonomi, dan aspek lingkungan fisik.

Aspek konservasi satwa mendapat nilai kontibusi yang masih rendah, bahkan dinilai perlu untuk diperbaiki performanya dan prioritasnya termasuk pada realisasi kesejahteraan satwa, perkembangbiakannya, dan dukungan untuk konservasi lembaga dengan pelepasan satwa ke habitat aslinya. Aspek sosial

ekonomi berada pada tingkat sedang, karena pengelola mendukung akses bagi masyarakat sekitar dalam mendirikan usaha tetapi pada realisasi penyerapan tenaga kerja masih belum optimal. Sedangkan aspek lingkungan fisik berada pada tingkat kontribusi yang sedang, hal ini dikarenakan jenis-jenis vegetasi yang terdapat di dalam kebun binatang Bandung masih belum optimal dalam menyerap dan menjerap debu serta polutan.

Kebun Binatang Bandung sebagai konservasi pemerawatan satwa seharusnya lebih jeli dalam memperhatikan kesehatan, perawatan, dan kesejahteraan hewan seperti yang tercantum dalam Pasal 39, dan Pasal 66 UU No. 18 Tahun 2009 mengatur mengenai kesehatan dan kesejahteraan hewan. Pasal 39 menjelaskan mengenai langkah penyembuhan bagi satwa yang terkena penyakit dengan tindakan menghilangkan rasa sakit, penyebab penyakit, mengoptimalkan kebugaran hewan dengan perbaikan gizi, penyediaan, pemakaian obat hewan, sarana dan prasarana, pengawasan, pemeriksaan, serta pemantauan, dan evaluasi setelah pengobatan. Bahkan pasal 66 yang menjelaskan mengenai kesejahteraan hewan, yang dimaksud dengan kesejahteraan hewan yaitu berbagai tindakan yang berkaitan dengan penangkapan penanganan, penempatan dan pengandangan pemeliharaan, perawatan pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

Dari kedua pasal tersebut jika dihubungkan dengan kasus gajah sumatera yang sakit dan dibiarkan begitu saja dan penelitian Puspitasari yang menilai bahwa aspek konservasi satwa masih dinilai rendah tentu sangat bertentangan, pengelola dinilai abai dalam memelihara, merawat, menjaga, dan mensejahterakan hewan. Dibuatnya kebun binatang adalah untuk pemeliharaan hewan/satwa yang kehilangan habitat aslinya akibat kerusakan yang dibuat manusia, dengan menyerupai lingkungan habitatnya agar kegenetikannya tidak hilang, tetapi apalabila seperti itu fungsi dari adanya kebun binatang tidak selaras dengan substansi seharusnya. Karena pada basisnya kehidupan satwa sudah sejahtera dengan diberikannya lingkungan baru tetapi semakin memburuk karena kurangnya pengelolaan yang baik di kebun binatang tersebut. Selain itu akan memiliki segi negatif pada bidang pendidikan dan penelitian, serta pariwisata, Bahkan seharusnya

sebagai objek wisata, Kebun Binatang perlu memperhatikan fasilitas serta perlu memperhatikan kesehatan satwa.

Melalui realitas tersebut tentu kita tidak bisa tinggal diam melihat kehidupan satwa begitu mengkhawatirkan, dan berpotensi merusak kekayaan hewani Indonesia. Sehingga perlu eksisnya keterlibatan masyarakat (*civic engangment*) sebagai aktivitas dalam membantu merawat satwa agar terkelola dengan baik, sebagai bentuk pastisipasi masyarakat dalam mengembangkan, dan melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Hal itu tentu membutuhkan komitmen yang kuat sebagai bagian dari warga negara yang mencintai alam Indonesia, atau disebut dengan *civic commitment* atau komitmen warga negara. *Civic commitment* dalam konteks ini adalah komitmen warga negara atau masyarakat dalam melindungi, menjaga, memelihara, mengembangkan, melestarikan dan mensejahterakan kehidupan satwa baik itu dari segi kesehatan, pakan, pengobatan, dan kandangnya. Pengamalan *civic commitment* dan *civic engangment* dapat dilakukan dengan berkontrubusi pada kegiatan filantropi yang berkaitan dengan pelestarian hewan dan secara sederhanaya mampu melalui sumbangan kepada Kebun Binatang Bandung berupa makanan, jasa, bahkan hewan peliharaan.

Dengan membangun konservasi *in situ* dan ex situ menyelamatkan satwa dari ancaman kepunahan sudah termasuk pada kategori atau praktis *civic commitment*, karena tersedianya komitmen dari warga negara melindungi dan melestarikan satwa liar dari perburuan ilegal, perdagangan ilegal, dan perusakan habitat (Sanjaya, 2019). Eksistensi Kebun binatang perlu dioptimalkan dalam memenuhi hak-hak hewan, tentu dengan adanya komitmen dalam menjaga, maka sudah timbul *civic commitment* dalam diri setiap warga negara. Tetapi yang menjadi fokus peneliti adalah setelah adanya lembaga konservasi seperti kebun binatang, apakah telah selaras dengan implementasi *civic commitment*, baik pada pihak pengelola, komunitas, bahkan masyarakat yang mengunjungi kebun binatang. Mengingat dua contoh kasus diatas pengelolaan dan standar kesejahteraannya masih dinilai rendah untuk seukuran kebun binatang Bandung.

Melalui penelitian dari Suherlan pada tahun 2020, memaparkan bahwa kebun binatang Bandung mengalami berbagai problematik, akibat mewabahnya Pandemi Covid-19, yaitu pada aspek pengelolaannya yang belum memiliki standar

perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaannya. Selain itu masalah menurunnya pemasukan yang sangat drastis tidak sesuai dengan amanat pemeliharaan kebun binatang harus konsisten dijaga. Tentu problematik tersebut bisa diselesaikan dengan *civic commitment*, yang mengarah pada *civic movement*, sebagai bentuk filantropi dalam menjaga agar Kebun Binatang Bandung bisa tetap beroprasi dan mampu memenuhi hak-hak hewan.

Dilihat dari permasalah yang ada di kebun binatang Bandung, tentu peneliti berorientasi untuk menganalisis dan merefleksikan lebih lanjut tentang implementasi *civic commitment* melalui pengelolaan kebun binatang di Kota Bandung. Sebagai upaya ilmiah untuk mengetahui berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh kebun binatang Bandung dalam pengelolaannya. Karena setiap upaya yang berkaitan dengan kebaikan pasti terdapat suatu hambatan dan tangangan. Termasuk pada pengelolaan Kebun Binatang Bandung, yang agar efektif, efisien dan komprehensif, perlu adaptif pada modernisasi dan digitalisasi, sehingga marketing dalam upaya mencari laba untuk memenuhi pengeluaran demi kesejahteraan hewan dan kualitas fasilitas, sarana bahkan prasarana kebun binatang, agar menarik minat wisatawan.

Mengingat rendahnya kualitas pengelolaan kebun binatang Bandung, tentu perlu tersedianya kebijakan atau program dalam memperbaiki mutu pengelolaan kebun binatang Bandung, agar aktivitas yang berkaitan dengan konservasi, jauh lebih baik lagi, sehingga upaya penyejahteraan kehidupan satwa, dan realisasi fasilitas Kebin Binatang Bandung bisa selaras dengan orientasi. Tentu strategi serta perencanaan yang sesuai dengan masalah dan peluang, perlu diberlakukan, agar upaya pengelolaan Kebun Binatang Bandung mampu mengatasi berbagai hambatan, karena strategi dan upaya tersebut menjadi bentuk *civic commitment*, baik dari pihak pengelolanya, komunitas, bahkan masyarakat umum. Sebagai praktis dari konsep PKn dalam arti luas (*citizenship education*), karena berupaya untuk memberikan kajian dan pembelajaran langsung tentang pentingnya komitmen warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan, keberlangsungan hidup hewan atau satwa, sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan.

Karena PKn tidak hanya sebatas kajian mengenai konsep warga negara yang cerdas baik. Tetapi juga menekankan pentingnya realisasi dari konsep warga

negara yang ideal tersebut, agar bermanfaat positif, bagi terwujudnya kehidupan sosial yang adil dan sejahtera. Tentu tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi lingkungan bahkan hewan, karea mereka perlu dijamin keberlangsungan hidupnya melalui perilaku terpuji manusia, pada konteks komitmen warga negara terhadap pengelolaan Kebun Binatang Bandung, tentu menjadi wahana strategis untuk mengetajui secara objektif, mengenai kesenjangan antara cita-cita keilmuan PKn dalam arti luas (*citizenship education*) dengan realitasnya. Karena warga negara yang cerdas dan baik, adalah mereka yang melindungi keberlangsungan lingkungan dan hewan, sehingga keilmuan PKn mampu berkontrubusi bagi pembangunan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Setelah menganalisis dan merefleksikan berbagai masalah yang ada di dalam latar belakang penelitian, tentu peneliti memfokuskan berbagai masalah tersebut pada rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana hambatan dalam mengelola kebun binatang Bandung?
2. Bagaimana strategi dan upaya dalam memperbaiki tata kelola kebun binatang Bandung sebagai bentuk *civic commitment*?
3. Bagaimana kesukarelaan masyarakat Kota Bandung dalam pengelolaan kebun binatang sebagai bentuk *civic egangement*?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *civic commitmen* melalui pengelolaan Kebun Binatang Kota Bandung Bandung sebagai upaya mengatasi berbagai masalahnya, dan berkontrubusi pada penguatan keterlibatan warga negara dalam pengelolaan Kebun Binatang Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus atas penelitian ini, pada basisnya untuk mengetahui deskripsi umum mengenai permasalahan dan upaya mengatasi permasalah tersebut, tentu lebih spesifiknya sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai hambatan dalam mengelola Kebun Binatang Bandung.
2. Memberi gambaran mengenai strategi dan upaya dalam memperbaiki tata kelola kebun binatang Bandung sebagai bentuk *civic commitment*.
3. Memberi gambaran bagaimana bentuk kesukaarelaan masyarakat Kota Bandung dalam pengelolaan kebun binatang sebagai bentuk *civic engangement*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian pasti memiliki maksud, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai realisasinya, salah satunya tentu dapat bermanfaat untuk masyarakat. Manfaat penelitian ini tidak hanya untuk peneliti, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat juga bisa merasakannya. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:

1.4.1. Segi Teoretis

Manfaat penelitian ini, apabila ditinjau dari segi teoretis adalah ingin melihat realitas *civic commitment* di masyarakat baik itu dari pengelola, pengungjung, ataupun aktivitas daeri komunitas pecinta satwa, dan tentu pada praktiknya perlu memerlukan disiplin ilmu PKn dalam arti luas (*citizenship education*). Karena merupakan aktivitas pembelajaran demokrasi, politik, budaya dan hukum bagi masyarakat, pada konteks pengelolaan kebun binatang yang berkualitas tentu merepresentasikan konsep warga negara yang cerdas dan baik, karena terlibat dan berkomitmen dalam mengembangkan, melestarikan, melindungi dan menyejahterakan ekosistem flora dan fauna di Indoensia melalui pengelolaan kebun binatang. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya, agar dapat lebih berkembang.

1.4.2. Segi Kebijakan

Manfaat penelitian ini dilihat dari segi kebijakan adalah memberi gambaran dari kebijakan pengelola Kebun Binatang Bandung sebagai bentuk *civic commitment* dalam menyejahterakan kehidupan satwanya. Tentu penelitian ini bisa mendeskripsikan bagaimana kebijakan pengelolaan Kebun Binatang Bandung dalam upaya membentuk *civic commitment*, problematik yang menjadi hambatan

dalam realisasinya, bagaimana strategi dalam menghadapi kesulitan tersebut dan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk memperbaikinya, agar bisa menyelesaikan persoalan yang menjadi penghambat implementasi *civic commitment* melalui pengelolaan Kebun Binatang Bandung.

1.4.3. Segi Praktis

Dilihat dari segi praktis penelitian ini mengenai implementasi *civic commitment* melalui pegelolaan kebun binatang Bandung, merupakan wahana strategis dalam menumbuhkan keteribatan masyarakat (*civic engangment*) dan *civic commitment* baik pada pihak pengelola kebun binatang, maupun masyarakat sebagai komunitas yang memiliki peran bahkan komitmen untuk melindungi, merawat, dan menyejahterakan kehidupan satwa liar sebagai ptaktis warga negara yang melestarikan ekosistem flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tanpa adanya partisipasi dan komitmen dari pengelola ataupun pengungjung sebagai warga negara akan sulit membawa perubahan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kebun binatang.

1.4.4. Segi Isu serta Aksi Sosial

Manfaat segi isu serta aksi sosial pada penelitian diharapkan mampu memberi deskripsi kepada masyarakat luas akan pentingnya mensejahterakan kehidupan satwa dan memelihara ekosistemnya yang merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia melalui *civic commitment*. Setiap warga negara harus mampu melindungi berbagai jenis kehidupan yang ada di dalamnya terlebih kebun binatang sebagai lembaga konservasi yang sengaja dibentuk untuk melindungi satwa. Sehingga diharapkan penelitian ini mampu menjadi basis dari *civic movement* (gerakan warga negara) yang melestarikan hewan, dan menjadi basis gerakan filantropi (kesukarelaan, kesadaran dan cinta), untuk terlibat dalam praksis penyejahteraan hewan, sebagai kekayaan Indonesia.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika dalam penulisan penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UPI (2019), yaitu diantanya:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI: Pada bab ini berisikan konsep dan teori yang berkaitan dengan permasalah penelitian, penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis, dan kerangka berpikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini berisikan alur penelitian, dimulai dari desain penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, tahap mengolah data dan proses menganalisis data.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini berisikan pemaparan hasil temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian. Pembahasan pada bab ini adalah kesimpulan hasil temuan yang dianalisis dari sudut pandang peneliti dan diselaraskan dengan teori dan konsep-konsep pendukung.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI: Pada bab ini berisikan simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.